
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bulkisma Putri¹, Nazaruddin², Asnawi³

¹Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humanioran, Universitas Islam Negeri Banda Aceh

email: 180503013@student.ar-raniry.ac.id

²Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humanioran, Universitas Islam Negeri Banda Aceh

email: nazaruddin@ar-raniry.ac.id

³Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humanioran, Universitas Islam Negeri Banda Aceh

email: asnawi.adan@ar-raniry.ac.id

Abstract

The problem in this study is how the development of social inclusion-based village library services carried out by the Central Aceh Regency Library and Archives Office and what are the obstacles in the development of social inclusion-based village library services. This study aims to determine the development of social inclusion-based village library services by the Central Aceh Regency Library and Archives Office and to find out the obstacles in the development of social inclusion-based village library services, The method used in this research is to use descriptive methods with a qualitative approach, Data collection techniques used in this research are interviews and documentation. The results obtained are the development of social inclusion-based village libraries carried out by the Central Aceh Regency Library and Archives Office carried out by several activities, namely, providing facilities to village libraries, socialization, technical guidance for library managers, technical guidance on revitalizing libraries based on social inclusion, advocacy, peerlearning Meeting (PLM), stake holder meetings, and community involvement. The obstacles are limited budget, low human resources, and lack of support from the village government.

Keywords: Social Inclusion, Village Library, Central Aceh District Library and Archives Office

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah serta apa saja kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan layanan perpustakaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan beberapa

kegiatan yaitu, pemberian fasilitas kepada perpustakaan desa, sosialisasi, bimtek pengelola perpustakaan, bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, advokasi, *peerlearning Meeting* (PLM), *stake holder meeting*, dan pelibatan masyarakat. Adapun kendalanya yaitu keterbatasan anggaran, rendahnya SDM, dan kurangnya dukungan pemerintah desa

Kata Kunci: Inklusi Sosial, Perpustakaan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

1. PENDAHULUAN

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi program prioritas nasional yang digaungkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tujuan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM, peningkatan kemampuan literasi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan bagian dari 17 cakupan *Sustainable Development Goals* atau di Indonesia lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, di mana istilah pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan antara lain pengentasan kemiskinan, kelaparan, membangun kehidupan sejahtera dan sehat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak pertumbuhan ekonomi dan masih banyak lagi yang pada intinya untuk mensejahterakan masyarakat (Rachman, dkk, 2019: 907) .

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu perpustakaan umum yang melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, adapun yang dimaksud dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah suatu pendekatan pelayanan pada perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, program ini dilaksanakan dengan kegiatan pelibatan masyarakat tanpa terkecuali dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan.

Berdasarkan observasi awal penulis, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan dan mengembangkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018, pada tahun 2019 menggandeng perpustakaan desa yang berada di Kabupaten Aceh Tengah untuk di kembangkan memiliki layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tumbuh dan kembangnya perpustakaan desa merupakan tanggung jawab perpustakaan daerah atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan suatu daerah karena perpustakaan desa merupakan perpanjangan tangan layanan dari perpustakaan daerah, untuk itu perpustakaan yang berada di desa perlu dikembangkan salah satunya melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Hasil wawancara dengan ibu Sukmawati, SH dari bidang pengembangan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, pada saat melakukan observasi awal, dalam upaya pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan kabupaten Aceh Tengah menyiapkan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan dan pembinaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Adapun kegiatan tersebut yaitu melaksanakan bimbingan teknis terkait layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi pengelola perpustakaan desa

selanjutnya melaksanakan bimbingan revitalisasi bagi perpustakaan desa yang dianggap memenuhi kriteria sebagai perpustakaan desa yang dapat dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah juga melaksanakan kegiatan pembinaan bagi perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusiososial dalam mengelola dan mengolah hasil bumi di bidang pertanian dan perkebunan serta membuat produk berdasarkan budaya setempat yang bernilai jual sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Perpustakaan yang ikut dibina dalam pengelolaan dan pengolahan hasil bumi serta produk budaya setempat tersebut tersebut terdiri dari 10 unit perpustakaan dengan masing-masing perpustakaan memiliki produk yang bernilai jual, perpustakaan desa tersebut yaitu perpustakaan desa Tebes Lues, Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, Perpustakaan desa Blang Mancung, Perpustakaan desa Kung, Perpustakaan desa Jagong Jeget, Perpustakaan desa Mongal, Perpustakaan desa Kemili, Perpustakaan desa Kelitu, Perpustakaan desa Arul Latong dan Perpustakaan desa Kala Kemili, salah satu pengolahan hasil bumi di bidang pertanian dan perkebunan tersebut dilakukan oleh masyarakat pada perpustakaan desa Tebes Lues kecamatan Bies kabupaten Aceh Tengah, di mana hasil bumi yang di olah yaitu tanaman kopi, perpustakaan desa Tebes Lues mengolah kopi menjadi minuman yang dinamai dengan Kopi Kertup dan perpustakaan desa yang membuat produk berdasarkan budaya setempat yaitu perpustakaan desa PayaTumpi baru yaitu membuat kerajinan kerawang gayo.

Dilihat dari kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berada di perpustakaan desa memiliki respon yang cukup baik, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan secara langsung dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di desa tersebut, maka dari itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah juga harus memiliki rancangan agenda untuk program-program yang menunjang pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Perpustakaan Umum

Pamuntjak mendefinisikan Perpustakaan umum sebagai tempat menghimpun koleksi, terbitan berkala, dan dokumen lain untuk kepentingan masyarakat luas. Perpustakaan umum dibangun sebagai lembaga yang terbuka dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan setiap masyarakat dapat menggunakan layanan dan koleksi yang ada di perpustakaan tanpa dibedakan pekerjaan, kedudukan, kebudayaan, dan agama (Novita, 2016: 7).¹

Lebih lanjut perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 43 Tahun 2007 adalah perpustakaan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, memiliki koleksi yang mencerminkan budaya setempat, dan terbuka untuk semua anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang atau orientasinya.

B. Peran Perpustakaan Umum

¹ Nofita Waas, *Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (Bpad) Provinsi Sulawesi Utara, Acta Diurna V*, no. 2 (2016): 1–7

Berdasarkan UU No 43 Tahun 2007 ada beberapa peran perpustakaan umum tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dapat dijalankan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Wahana pendidikan bagi masyarakat.
- 2) Menjadi wahana penelitian dan pelestarian informasi
- 3) Berperan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat umum.
- 4) Menjadi lembaga yang menyediakan layanan kepada masyarakat sebagai pengguna perpustakaan.
- 5) Berperan dalam meningkatkan minat baca, serta memperluas pengetahuan masyarakat.

Salah satu peran perpustakaan umum tingkat daerah adalah membina dan mengembangkan perpustakaan desa, pembinaan tersebut dilakukan pada perpustakaan desa yang ada di daerah dengan tujuan agar perpustakaan desa dapat terus menjadi perpanjangan tangan pelayanan dari perpustakaan desa. perpustakaan umum tingkat daerah dalam menyediakan sumber informasi bagi masyarakat. Perpustakaan desa perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar perpustakaan desa dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan fungsi dan perannya sebagai sumber informasi dan sarana penunjang pembelajaran bagi masyarakat pengguna perpustakaan desa (Dwi Puspitas Sari, dkk. 2017)

Dewasanya perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia kian hari semakin berkembang hal ini dibenarkan dengan adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. PERPRES No. 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembangunan perpustakaan di Indonesia pada tahun 2019 harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai bagian dari program berbasis inklusi sosial Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020 yang lebih besar. Strategi yang digunakan dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan cara :

- 1) Melakukan peningkatan dalam belajar secara efektif.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi.
- 4) Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat terkait perpustakaan.
- 5) Pemanfaatan sumber dana secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk ikut merasakan manfaat dari perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh perpustakaan umum dapat dilakukan dengan berapapa strategi, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan pemustaka yang berada di wilayah perpustakaan desa yang sedang dibina dan dikembangkan, indentifikasi ini dilakukan agar dapat menyesuaikan dan menyediakan koleksi yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat.
- 2) Menyediakan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan masyarakat.
- 3) Memfasilitasi kegiatan masyarakat, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan bekerjasama dengan perpustakaan desa yang dibina dalam memfasilitasi kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan.

- 4) Mendukung segala bentuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Melakukan advokasi
- 6) Memonitoring perpustakaan desa yang dibina.

C. Perpustakaan Desa

Menurut Domai (2018) Perpustakaan desa ialah perpustakaan umum yang berada di suatu desa dan difungsikan untuk melayani masyarakat setempat yang menjadi salah satu sarana pendukung dalam hal pendidikan dan informasi masyarakat desaserta menjadi bagian dari peningkatan pembangunan desa.

Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah No.3 Tahun 2001, tujuan perpustakaan desa/kelurahan adalah mencerdaskan, memberdayakan, dan membantu warga di lingkungan desa/kelurahan dengan menyediakan bahan bacaan dan koleksi sebagai salah satu sumber belajar.

Salah satu tujuan utama perpustakaan desa adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Perpustakaan desa memiliki potensi sebagai pusat pembelajaran, pertumbuhan komunitas, dan penemuan informasi. Menurut Qalyubi (2018) setiap perpustakaan memiliki fungsi pokok yang sama, fungsi tersebut yaitu pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi kultural.

Menurut Sutarno Ns yang dikutip oleh Musvitas Sari menyebutkan tujuan perpustakaan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung program wajib belajar bagi masyarakat desa.
- 2) Meningkatkan kegemaran masyarakat untuk senantiasa belajar, peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat.
- 3) Memberi hiburan dan menumbuhkan sikap optimis terhadap pembelajaran.
- 4) Melengkapi kebutuhan masyarakat akan sumber daya berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang.
- 5) Menyediakan kebutuhan sarana edukasi, rekreasi, penerenagan, informasi dan penelitian bagi warga desa.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang di mana penelitian tersebut dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan keadaan di lapangan dan bersifat alamiah (Galang Suya Gumilang, 2016).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, yang terletak di Jl. Commodore Yos Sudarso No.6 Takengon, Aceh Tengah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah saat ini membina 10 perpustakaan desa untuk dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan proses pembinaan dan pengembangan yang dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perpustakaan Nasional. Pengembangan yang dilakukan dimulainya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, pengembangan ini dilakukan oleh bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, sebagai PIC (penanggung jawab) Ibu Sukmawati.

1. Pengembangan Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang berada di desa dan telah memiliki layanan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat pengguna perpustakaan desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengembangkan dan membina beberapa perpustakaan desa menjadi perpustakaan yang memiliki layanan berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memiliki fokus kegiatan dalam pengembangan tersebut yaitu melakukan pengembangan kreativitas masyarakat melalui kegiatan pelibatan masyarakat berbentuk pelatihan-pelatihan mengolah produk yang bernilai jual. Dalam hal ini perpustakaan desa yang dibina dan dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sudah berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta sebagai penyedia fasilitas pengembangan kreativitas masyarakat dan menjadi wadah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan dengan beberapa kegiatan yang diamanahkan oleh Perpustakaan Nasional, adapun kegiatan tersebut yaitu:

a. Pemberian fasilitas Kepada Perpustakaan Desa

Fasilitas yang diberikan merupakan pemberian dari Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, fasilitas yang diberikan yaitu berupa komputer, printer, TV, Koleksi, Rak Buku dan Server. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan desa untuk mengimplementasikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada pengguna perpustakaan, seperti memanfaatkan komputer untuk fasilitas pembelajaran masyarakat.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ialah dilakukan selama 3 bulan pada awal tahun dan sosialisasi ini dilakukan oleh tim dari bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka, adapun materi sosialisasi yang disampaikan yaitu menyangkut peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, peningkatan mekanisme

pelibatan masyarakat, pemberian dukungan dan membangun komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memberikan manfaat bagi pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

c. **Bimtek Pengelola Perpustakaan**

Bimbingan teknis pengelola perpustakaan dilakukan bagi seluruh pengelola perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah secara umum, adapun materi yang disampaikan pada bimbingan teknis tersebut yaitu berupa materi jadwal buka tutup perpustakaan, pengolahan koleksi, dan peningkatan minat baca masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya bimbingan teknis ini yaitu sebagai bekal bagi pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan berbasis inklusi sosial secara optimal.

d. **Bimtek Revitalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Bimtek revitalisasi ini dilakukan bagi pengelola perpustakaan desa yang telah mengikuti program perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana bimbingan teknis ini dilakukan secara bertahap yaitu pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan bimbingan teknis ini di Nasional maupun Provinsi dan berikutnya dilakukan untuk pengelolaperpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten. Tujuan dilakukannya bimtek ini yaitu sebagai evaluasi dan penguat bagi tim maupun pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

e. **Advokasi**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melakukan advokasi dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, advokasi yang dilakukan yaitu bersama pemerintah desa baik kepala desa maupun perangkat desa. Tujuan dilakukannya advokasi ini yaitu untuk mendapatkan dukungan berupa materi maupun lainnya agar pengembangan layanan perpustakaan desa dapat dikembangkan secara efektif.

f. **Mentoring/Pendampingan**

Mentoring dilakukan pada saat perpustakaan desa membuat kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, dengan adanya mentoring yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah para pengelola perpustakaan desa mendapatkan perhatian dan merasa didukung untuk terus mengembangkan layanan tersebut pada perpustakaan desa yang mereka kelola.

g. **Peer Learning Meeting/ PLM**

Peer Learning Meeting dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan cara memfasilitasi pengelola perpustakaan desa untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman selama mereka mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, *Peer Learning Meeting* yang dilakukan bertujuan untuk pengelola perpustakaan desa agar mereka tetap terus maju dan mendapatkan motivasi untuk terus melakukan pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa yang dikelola.

h. **Stake Holder Meeting**

Stake Holder Meeting merupakan kegiatan mempertemukan pemegang kepentingan, di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengadakan *stake holder meeting* bersama pemegang kepentingan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kepala daerah, Pihak Dinas terkait maupun swasta, dilakukannya *stake holder meeting* bertujuan untuk menyamakan tujuan, menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

i. **Pelibatan Masyarakat**

Pelibatan masyarakat merupakan hasil dari pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, pada perpustakaan desa Tebes Lues kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan yaitu Pelatihan membuat rak pot gantung, pelatihan membuat minuman kopi kertup, peningkatan literasi anak dan bimbingan belajar, serta membuat apotek hidup.

Pada perpustakaan desa Kala Kemili kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan berupa pelatihan membuat saos kemasan, pelatihan membuat konektor masker, pelatihan membuat jilbab payet dan bimbingan komputer untuk anak-anak. Kemudian pada perpustakaan desa Paya Tumpi Baru pelibatan masyarakat dilakukan dalam kegiatan bimbingan belajar anak-anak, Kerjasama UMKM, pelatihan dasar komputer, pelatihan merajut dan pelatihan membuat bouqet bunga.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat sudah dilakukan dengan efektif.

2. Kendala Dalam Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial

beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dihadapi, adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Keterbatasan Anggaran**

Setiap organisasi sudah seharusnya memiliki anggaran untuk membiayai keperluan operasional, intensif pegawai dan lain-lain. Anggaran merupakan hal yang sangat penting dan perlu disiapkan perpustakaan agar kegiatan-kegiatan dan pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan Pengelola Perpustakaan Desa dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial karena dalam pengembangan perpustakaan perlunya harus memiliki dana untuk biaya operasional, keperluan pegawai dan lainnya.

b. **SDM Kurang Memadai**

Bagi pengembangan sebuah perpustakaan diperlukan SDM yang memadai, salah satunya pengelola perpustakaan. Kurang memadainya SDM menjadi kendala pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dirasakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

c. **Kurangnya Dukungan Pemerintah Desa**

Perpustakaan yang berada di desa merupakan fasilitas bagi masyarakat desa untuk mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensidiri

sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari pihak pemerintahan desa, namun kurangnya dukungan dari pemerintahan desa menjadi salah satu kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dirasakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. kurangnya dukungan dari pemerintahan desa menjadi kendala kurangnya dukungan dari pemerintahan desa menjadi kendala

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, maka penulis menyimpulkan:

- a. Pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan beberapa kegiatan pengembangan, adapun kegiatan tersebut yaitu: pemberian fasilitas kepada perpustakaan desa, Sosialisasi, Bimtek Pengelola Perpustakaan, Bimtek Revitalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Advokasi, *Peer Learning Meeting* (PLM), *Stake Holder Meeting* dan Pelibatan Masyarakat.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah Keterbatasan anggaran, Rendahnya SDM dan Kurangnya Dukungan Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). In Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran.
- Nofita Waas, *Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (Bpad) Provinsi Sulawesi Utara, Acta Diurna V*, no. 2 (2016): 1–7
- Undang-Undang Republik Indonesia No.43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Dwi Puspita Sari dan Yuli Rohmiyati, "Peran Pembinaan Perpustakaan Pada Eksistensi Perpustakaan Desa Di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2017): 471–80, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23179>.
- Perpustakaan Nasional RI. (2019), *Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, Kab / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan*.
- Niken Lastiti Tjahjanulin Domai, "Pelatihan Pengolahan Koleksi Dalam Mendukung Pengembangan Perpustakaan" 02, no. September (2018): hlm 69–83.
- Ika Krismayani, "Mewujudkan Fungsi Perpustakaan di Daerah," *Anuva* 2, no. 2 (2018): 233, <https://doi.org/10.14710/242>.
- Galang Surya Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*, Jurnal Fokus Konseling (2016), <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.